

PENGARUH DEMOKRASI PANCASILA TERHADAP PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI DI INDONESIA

Sastra Wijaya¹, Jumanah², Dewi Lestari³, Jihan Nursakinah⁴

sastrawijaya0306@gmail.com¹, jumanah8207@gmail.com², dl685127@gmail.com³,
jihannursakinah080@gmail.com⁴

Universitas Primagraha

ABSTRAK

Abstrak: Pengaruh Demokrasi sangatlah besar bagi negara Indonesia tersendiri khususnya dimulai dari segi aspek pembangunan sosial, ekonomi negara yang semakin pesat, kesejahteraan masyarakat Indonesia, segi pendidikan, dan segi budaya yang terdapat di setiap daerah Indonesia tersendiri. Pancasila yang tak lain merupakan dasar dari negara Indonesia ini yang menjadikannya asas untuk menciptakan masyarakat yang adil dalam membangun suatu perekonomian negara yang akan terus berkelanjutan nantinya. Dengan menerapkan pemerintahan secara demokrasi, Indonesia telah mengembalikan kekuasaan yang dahulu secara kekerajaan di setiap daerahnya kini disatukan dan diserahkan kepada rakyat untuk bebas memilih siapa yang akan menjadi pengurus negara ini. Demokrasi Pancasila mendorong para masyarakat untuk ikut andil dalam bidang politik dengan mengambil keputusan yang dasarnya ada ditangan rakyat. Sistem Ekonomi Pancasila berorientasi pada ekonomi kerakyatan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Selain itu, Pancasila juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, mobilitas sosial, dan penerapan kebijakan publik yang adil untuk mengurangi ketimpangan sosial. Implementasi nilai-nilai Pancasila secara komprehensif diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam membangun masyarakat yang adil, merata, dan sejahtera di Indonesia. Meskipun demokrasi Pancasila telah memberikan dampak positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia, tetap ada ketimpangan sosial dan ekonomi yang harus diatasi, seperti kesenjangan dalam akses kesehatan, pelayanan medis, dan lapangan kerja serta upah yang tidak adil. Untuk mencapai keseimbangan lebih baik, diperlukan peningkatan implementasi kebijakan publik dan terus menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia.

KataKunci: Demokrasi, Implementasi, Sosial.

PENDAHULUAN

Seperti yang kita pahami bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Negara yang memiliki asas demokrasi pastinya tak luput dari permasalahan suatu negara tersebut tak lain adalah upaya menaikkan ekonomi di indonesia dan membangun kehidupan sosial politik yang lebih terbaik kedepannya.. Sistem ekonomi Indonesia, yang disebut Sistem Ekonomi Pancasila, mencari keseimbangan antara dua kutub ekonomi yang ekstrim, yaitu sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Hal ini dilakukan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Selain itu, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi juga mencakup internalisasi dan institusionalisasi kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi, di mana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu. Dengan demikian, latar belakang permasalahan ini mencakup upaya untuk mencapai keseimbangan sosial dan ekonomi yang

lebih baik melalui implementasi demokrasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Agustamsyah, 2011)

Demokrasi Pancasila, sebagai sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan kerakyatan, menjadi landasan dalam upaya membangun masyarakat yang adil, merata, dan berkeadilan. Implementasi demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan, serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Selain itu, demokrasi Pancasila juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, mobilitas sosial, dan penerapan kebijakan publik yang adil untuk mengurangi ketimpangan sosial. Meskipun telah memberikan dampak positif, masih terdapat isu terkait dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang harus diatasi, seperti kesenjangan akses kesehatan, pelayanan medis, lapangan kerja, dan upah yang tidak adil (Sianturi & Dewi, 2021). Untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik, diperlukan peningkatan implementasi kebijakan publik dan penguatan terus-menerus terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Rakyat Indonesia diperlukannya kesadaran bahwa negara ini butuh kesatuan dan persatuan agar terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kokoh dan kuat. Untuk membangun itu semua kita tidak bisa hanya berpangku tangan saja melihat tanpa bertindak, diperlukannya kesadaran dari seluruh rakyat untuk saling bahu membahu dalam mewujudkan itu semua. Dengan dibentuknya pancasila, maka diharapkan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi dari lima isi pokok yang ada didalamnya yang dengan mengamalkannya maka rakyat Indonesia akan menjadi bersatu dengan rakyat yang lainnya tanpa memandang dari sisi buruk maupun sisi suku asal suatu rakyat tersebut. Meskipun demokrasi Pancasila telah memberikan dampak positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia, tetap ada ketimpangan sosial dan ekonomi yang harus diatasi, seperti kesenjangan dalam akses kesehatan, pelayanan medis, dan lapangan kerja serta upah yang tidak adil. Untuk mencapai keseimbangan lebih baik, diperlukan peningkatan implementasi kebijakan publik dan terus menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Namun kenyataannya, tidak seluruhnya apa yang telah dirumuskan akan selalu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Adakalanya disetiap perbuatan terdapat beberapa cacat yang terjadi yang membuat suatu pembangunan dan suatu perekonomian tidak seluruhnya merata diberikan kepada rakyat Indonesia dari berbagai tempat. Dikarenakannya pemerintahan indonesia saat itu terdapat di pulau Jawa maka beberapa bangunan negara untuk fasilitas umum lebih cepat dibentuk dan digunakan dibandingkan dengan beberapa pulau indoyang lain. Ini disebabkan karena pemerintah terlalu fokus hanya kepada satu titik dan kurang memperhatikan kepada titik yang lainnya. Akibatnya, banyak dari rakyat yang terpencil kurang dalam merasakan fasilitas yang dibuatkan oleh negara misalnya kurangnya pembuatan jembatan yang membuat masyarakat sekitar daerah tersebut mengambil jalan pintas untuk menggunakan jalan lain yang lebih jauh dari yang dapat dijangkau lebih dekat.

METODOLOGI

Metode penelitian yang kami lakukan bermula dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tema yang dituju dan memahami dari keseluruhan informasi yang telah dikumpulkan. Kami menggunakan metode kualitatif dengan merujuk dari beberapa sumber terpercaya yang ada baik beberapa buku, berbagai jurnal, dan internet dan mengamati dari beberapa bukti yang ada dari jejak digital yakni youtube. Setelah selesai dengan

mengumpulkan beberapa informasi tersebut kami mengamati dari setiap informasi yang kami terima dan menganalisa dengan teliti dan kami mengambil dari beberapa informasi yang menurut penulis cocok dengan tema yang dituju dan kemudian digabungkan dengan sumber yang lainnya.

Setelah penulis menganalisa dan mengambil hasil analisa yang telah dituju kemudian hal yang selanjutnya yaitu dikelompokkan dari hasil analisis tersebut dengan beberapa kelompok yang tepat dengan pembahasan yang ingin dituju dan merincikan dari beberapa kelompok yang telah dipilih sebelumnya agar memudahkan bagi pembaca. Alat yang digunakan oelpenulis tak lain menggunakan laptop guna memudahkan dalam proses pengetikan dan, handphone yang digunakan untuk mencari beberapa sumber terkait, dan buku tentang demokrasi untuk menambahkan informasi dan surat kabar/koran lawas yang didalamnya terkait beberapa informasi pada zaman awal demokrasi di indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal mulanya sebuah gagasan tentang demokrasi ini sama sekali tidak ada di bumi Indonesia pada saat zaman penjajahan terjadi, melainkan pertama kali munculnya gagasan ini dari bangsa Inggris pada saat itu begitu juga dengan Amerika, dan Perancis yang mulai menggunakan gagasan tersebut. Akar yang mereka miliki dalam ideologi demokrasi adalah liberalisme (Witianti, 2016). Adapun liberalisme adalah aliran sebuah pemikiran filsafat yang mempertahankan suatu kebebasan dari setiap orangnya dari kebebasan yang akan berlaku secara mutlak dan utuhnya. Dengan itu liberalisme menjadi acuan tertinggi kepada suatu negara untuk bersama sama membangun suatu negara yang maju kedepannya, dan juga memberikan sebuah kebebasan untuk menjadikan setiap orang untuk bernegara. Dan kemudian terlahirnya nasionalisme dan demokrasi di dalam kehidupan berpolitik.

Kini Demokrasi sudah menjadi aturan yang pokok di setiap negara yang berkembang saat ini. Demokrasi sendiri bermula dari kata demos dan kratos yang berartikan kepemimpinan setiap negara tersebut berasal dari rakyat dan untuk rakyat kembali hasilnya. Menurut pengamat politik Amin Rais berfatwa bahwa pada dasarnya demokrasi merupakan dasar dalam hidup bernegara yang umumnya segala permasalahan yang terjadi pada negara tersebut akan kembali kepada rakyat yang menilai permasalahan tersebut begitu pula dengan pemerintahan yang terjadi kembali kepada rakyat yang akan memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin negara tersebut dan orang yang terpilih tidak seperti pada zaman kerajaan yang masih keturunan sesudahnya melainkan orang lain yang dipercaya oleh rakyat dapat membimbing negara kedepannya (Irawan, 2007). Dengan demikian demokrasi sepenuhnya berada pada tangan rakyat apapun itu bentuk dari pemerintahan yang ada.

Demokrasi merupakan suatu pemerintahan di negara yang segala keputusannya yang mengatur adalah rakyatnya. Di Indonesia, demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip dalam demokrasi Pancasila meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Ciri-ciri demokrasi Pancasila antara lain pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran-peran kelompok kepentingan, dan adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas (Aswandi & Roisah, 2019). Demokrasi Pancasila juga mengandung nilai-nilai dan tujuan yang tertuang dalam sila-sila Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Didalam pelaksanaan suatu demokrasi tersebut terkadang seringnya bergeser yang seharusnya menjadi keputusan ditangan rakyat melainkan tidak karena pemerintahan yang berusaha ingin memberi batasan kepada rakyat agar tidak segalanya dipilih oleh rakyat. Dan langkah langkah tersebut pun berhasil dijalankan oleh pemerintah dengan terjadinya perubahan di setiap konstitusi yang dibuat oleh pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu. Gerakan ini menjadikan penghambat dan tabir bagi rakyat dalam ruang demokrasi di negara. Dengan terbuktinya dari beberapa sejarah mengenai demokrasi di indonesia, tidak selamanya itu berjalan dengan konstitusi. Kenyataan bahwa silih bergantinya kepemimpinan untuk membuat keputusan agar membatasi rakyat dalam demokrasi sangat dibenarkan dengan adanya maklumat yang keluar dari wakil presiden nomor X.

Pada dasarnya demokrasi adalah bernuansa kedaerahan, budaya dari suatu tempat tersebut. Dikarenakan demokrasi berasal dari inggris maka ia akan mengikuti bagaimana jalannya suatu daerah tersebut seperti yang kita tahu inggris merupakan bagian barat yang biasanya bagian barat ini memiliki sifat individualis dan sudah pasti jika dilihat dari dasar ajaran barat tidak akan cocok bila disandingkan dinegara indonesia. Untuk itu indonesia perlu memiliki dasar yang khusus dari dasar dari ajaran negara lainnya melihat dari Inggris merupakan negara yang berbasis monarki atau kerajaan dan keputusan diambil melalui raja bukan diambil dari rakyat.

Dengan diadakannya demokrasi yang telah menjadi sarana bagi pemerintah untuk mendekatkan dirinya kepada rakyat dan lebih memiliki rasa empati kepada rakyat dan dengan itu akan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dengan itu efektifnya dan berjalannya suatu kesejahteraan tersebut akan terwujudkan dengan pemimpin yang telah menjalankan. Demokrasi yang efektif dan produktif akan terlihat dari segi pendidikan maupun ekonomi sekitar, dan budaya. Demokrasi pula mencakup dari segi hak asasi manusia karena demokrasi tak akan ada gunanya jika tidak dibumbui dengan hak asasi manusia.

Demokrasi Pancasila sejak dahulu merupakan suatu pemerintahan yang mengatur negara yang didalamnya mempelajari prinsip-prinsip tentang demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila membuat kalangan masyarakat ikut andil disetiap kejadian proses politik dan pengambilan keputusan, serta menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari konsentrasi kekuasaan yang tyrannis. Terdapat tiga prinsip mengenai demokrasi Pancasila yang didalamnya mengandung makna kebebasan atau persamaan diantaranya , kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Salah satu hal yang unik di Indonesia adalah pemilihan kepala negara maupun yang lain dilaksanakan secara demokratis atau kembali kepada pilihan rakyat. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan secara berkala untuk memilih diantaranya anggota parlemen, presiden, gubernur, bupati/wali kota, dan dari tingkat pemerintahan daerah lainnya. Penerapan dari Demokrasi Pancasila pula melibatkan sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip eksekutif, dan yudikatif. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari konsentrasi kekuasaan yang tyrannis.

Demokrasi Pancasila sampai kini diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem politik Indonesia didasarkan pada prinsip Demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Tjarsono, 2013). Salah satu aspek penting dalam Demokrasi Pancasila adalah pemilihan umum yang demokratis yang umumnya dikembalikan kepada rakyat. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara berkala untuk memilih anggota parlemen, presiden, gubernur, bupati/wali kota, dan tingkat pemerintahan

daerah lainnya. Di dalam peristiwa pemilihan umum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Implementasi Demokrasi Pancasila dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan perkembangan politik di Indonesia. Sistem ketatanegaraan di Indonesia menjunjung tinggi prinsip eksekutif dan yudikatif, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Esensi Pancasila adalah ketertarikan dan kepedulian setiap masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang kini telah menjadi dasar persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika, toleransi dan kerukunan yang harus dijalankan antarumat beragama, dan loyalitas dan integritas terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga telah menjelma menjadi sumber hukum, norma, dan etika bagi bangsa Indonesia, dan mampu menjawab tantangan dan peluang yang timbul akibat globalisasi dan kemajuan. Esensi Pancasila juga menjadi motivasi bagi warga negara untuk berprestasi dan berkarya demi kemuliaan bangsa, serta menjadi inspirasi bagi warga negara untuk berinovasi dan berkreasi dalam teknologi, seni, budaya, dan olahraga. Pancasila juga menjadi alat pendorong kemajuan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang.

Esensi Pancasila sebagai dasar negara adalah makna dan arti yang terkandung dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sumber hukum, norma, dan etika bagi bangsa Indonesia, serta alat penyesuaian bangsa Indonesia dengan perkembangan zaman dan kemajuan. Esensi Pancasila juga mencakup ketahanan dan kemanusiaan, serta menjadi jati diri, falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam esensi Pancasila sebagai dasar negara adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing, serta menjunjung tinggi nilai-nilai ketaqwaan, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: Menghormati martabat, hak, dan kewajiban asasi manusia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Persatuan Indonesia: Menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan kerukunan antarwarga negara yang beragama.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: Mewujudkan kedaulatan rakyat melalui sistem demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai-nilai tersebut merupakan esensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai sumber hukum, norma, dan etika bagi bangsa Indonesia.

Sebagaimana faktanya Demokrasi sangatlah berpengaruh terhadap keseluruhan tentang kenegaraan begitupun dengan pembangunan baik untuk negara maupun untuk budaya. Sebagaimana layaknya zaman ini apabila manusia tidak beriringan dengan teknologi maka ia tidak akan pernah mengenal apapun begitu juga dengan demokrasi apabila negara Indonesia tak menggunakan demokrasi maka indonesia tak akan berjalan seperti saat ini. Dikarenakannya budaya indonesia sangat banyak karena beragam ragam macamnya maka dari itu diperlukan pembangunan untuk setiap daerah setempat. Kebudayaan sejatinya bukan hanya mengoleksi barang barang suatu daerah tersebut, melainkan dengan menciptakan dari suatu budaya tersebut yang baru dari suatu kebudayaan yang ada. Untuk itu tak hanya hasil dari apa yang sudah dibangun saja yang penting

melainkan terdapatnya unsur budaya daerah tersebutlah yang juga begitu penting untuk mengetahui kualitas budayanya dan dapat menjadi kode etik dimasa yang akan datang. Pembangunan ini pun disebut sebagai modernisasi dan demokratisasi agar menambah nilai bagi bangsa Indonesia dan juga menambah devisa negara yang membuat para orang ingin lebih banyak mengetahui tentang budaya budaya negara Indonesia (Nurjahjo, 2003).

Secara umum pembangunan yang ada di Indonesia berdasarkan Demokrasi pembangunan yang pesat hanyalah terdapat di daerah pulau Jawa saja dan pulau lainnya tidak terlalu pesat seperti pulau Jawa. Kemungkinan besar pesatnya pembangunan di pulau Jawa dikarenakan di pulau inilah terletak segala pemerintahan negara dan akan banyak orang dari bangsa lain yang akan datang mengunjungi negara Indonesia dan pulau Jawa diperlukan pembangunan khusus untuk gedung pemerintahan begitu juga mengenai rumah adat untuk budaya daerah di pulau Jawa seperti rumah joglo di daerah jogjakarta dan di Jakarta pula terdapat monumen Nasional yang menceritakan tentang budaya satu indonesia dan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia begitu juga terdapat sejarah perang pada masa perjuangan Indonesia.

Pancasila sebagai landasan filosofis negara Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Di bidang perekonomian, Pancasila menekankan pentingnya sistem perekonomian yang mengutamakan keharmonisan sosial dan kesejahteraan rakyat, yang bertujuan untuk membebaskan mereka dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Hal ini tercermin dari penerapan sistem perekonomian berdasarkan sila Pancasila yang meliputi penekanan pada kerja sama, penghapusan kesenjangan sosial, dan terwujudnya perekonomian yang kuat dan seimbang. Lebih lanjut, penerapan Pancasila dalam konteks demokrasi menekankan perlunya pembangunan yang berpihak pada rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjamin kelestarian lingkungan (Purba & Hariyadi, 2023). Oleh karena itu, Pancasila memberikan kerangka bagi pengembangan kebudayaan bangsa dan menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

Kini daerah luar pulau Jawa pun banyak bangunan negara yang sudah mulai dibangun berkat adanya demokrasi tersebut seperti wisma Negara di Sulawesi Selatan yang mulai dibangun pada tahun 2015, kemudian pada masa pemerintahan presiden Jokowi dimulainya pembangunan bandara yang baru diluar pulau Jawa, beberapa jembatan, dan pelabuhan hingga diluncurkannya satelit yang membuat negara Indonesia tak tertinggal dengan negara negara pada umumnya. Pada pemerintahan presiden Jokowi, beliau hanya memberikan infrastruktur dasar untuk membangun suatu tempat tersebut, sisanya warga setempat yang akan bergerak sendiri untuk meningkatkan kehidupan sekitarnya. Dengan diberikannya infrastruktur tersebut masyarakat dapat membuat jalan yang sebelumnya berlubang dan tak layak untuk dilalui dan kini lebih mudah dilalui dikarenakannya diberikan infrastruktur tersebut.

Namun tidak semua yang terlihat akan selalu baik, terkadang terdapat beberapa dari suatu daerah tidak mendapatkan infrastruktur dari negara bahkan untuk menyebrang jalan saja mereka tidak memiliki jembatan dan mereka harus melewati desa lain yang lebih jauh perkiraannya dikarenakan jalur utama tidak bisa ditempuh. Kejadian ini biasanya terjadi di pulau terpencil di indonesia sehingga kurangnya pemerintah dalam mengamati daerah tersebut. Untuk itu pemerintah diperlukan lebih teliti dalam melihat suatu daerah yang memang masih kurang dalam fasilitas negara dan lebih banyak bersosialisasi ditempat yang memang benar benar membutuhkan fasilitas negara.

Berbicara tentang fasilitas negara pastinya akan menyangkut mengenai ekonomi negara yang pada saat ini sedang naik turun tak stabil seperti pada zaman presiden kedua yakni Soeharto. Zaman sekarang yang serba instan dan canggih ini tak mungkin masyarakat

Indonesia tak menginginkannya (Tria et al., 2022). Untuk itu kini warga Indonesia berlomba lomba untuk terlihat seperti orang yang diatasnya agar terlihat setara dengannya. Namun jika lebih ditinjau ekonomi di Indonesia saat ini lebih baik dari tahun 2019 lalu yang pada saat itu terdapat pandemi yang mengharuskan seluruh rakyat untuk berdiam diri dirumah dan dilarang melakukan pekerjaan diluar. Kejadian tahun itu yang membuat ekonomi di indonesia turun drastis karena tak ada pemasukan dari setiap kantor dan yang lainnya. Masyarakat pun hanya bergantung kepada bantuan negara dikarenakan tidak diwajibkan untuk keluar rumah karena banyaknya virus mematikan. Namun pasca dua tahun kemudian kembali ekonomi indonesia secara perlahan berkembang kembali seperti semula hingga kini.

Namun dengan pesatnya pembangunan di Indonesia pastinya banyaknya pengeluaran yang dikeluarkan negara dan tak mungkin negara dapat mengeluarkan biaya pembangunan seperti jalan tol yang menggunakan biaya fantastis menggunakan uang milik negara sedangkan mengingat beberapa tahun yang lalu negara pula mengglontorkan banyak dana untuk warga indonesia. Untuk itu pembangunan tol saat ini negara meminjam uang kepada suatu negara dan untuk itu pula pengeluaran tiap warga menambah untuk membayar jalan tol yang baru karena uang itu akhirnya akan disimpan untuk membuat bangunan lainnya yang belum terlaksana. Dan pembangunan jalan tol itulah hasil dari Demokrasi dengan usulan para pemerintah negara. Begitu juga dengan pelayanan negara berupa BPJS kesehatan yang membuat warga Indonesia bebas mengobati anggota keluarganya tanpa bayar jasa rumah sakit tersebut (Kian & Sabri, 2021). Contoh lainnya pula negara membuat beasiswa KIP bagi warga Indonesia yang kurang mampu dan ingin berpendidikan akan dibiayai sekolah gratis oleh negara dan ditanggung negara dan juga diberikan uang saku untuknya

KESIMPULAN

Gagasan mengenai Demokrasi sangatlah berguna bagi negara Indonesia selanjutnya begitu juga bagi rakyat Indonesia dan juga untuk yang lainnya. Memang diperlukannya tahap tahapan yang sangat lama namun pastinya akan ada hasil yang baik kedepannya. Banyak para peneliti mengungkapkan dengan adanya demokrasi di indonesia sangat berpengaruh dalam pembangunan dan perekonomian. Namun tak selamanya ekonomi akan selalu naik, ada masanya perekonomian indonesia tak naik. Demokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam konteks demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan politik dilakukan melalui musyawarah masyarakat dan lembaga perwakilan yang menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam bidang ekonomi, demokrasi menuntut adanya pembangunan yang berpihak kepada rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembangunan nasional mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, hukum, sosial politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi dapat menjadi kerangka bagi pengembangan kebudayaan bangsa dan mendorong pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustamsyah. (2011). Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia. *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(12), 79–91. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1524/0>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam

- Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Irawan, B. B. (2007). PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA. *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 5(1), 54–64.
- Kian, L., & Sabri, M. (2021). Internalisasi Dan Instansionalisasi Kebijakan Ekonomi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 45–56. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.23>
- Nurjahjo, H. (2003). Pengaruh Demokrasi Terhadap Lingkungan Budaya Nasional. 2, 257–267.
- Purba, S. F., & Hariyadi, H. (2023). Relasi Bauran Aspek Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 165–188. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.165-188>
- Sianturi, Y. R. U., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222–231. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1452>
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Jurnal Transnasional*, 4(2), 881–894.
- Tria, P. N., Cahyaningsih, F. F., Suwandi, R. A., & Fitriono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila dalam Bidang Ekonomi di Era Globalisasi. *Gema Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16456>
- Witianti, S. (2016). Demokrasi Dan Pembangunan. *Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, 1(1), 71–76. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.10547>